

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern dapat diketahui bahwa secara umum kondisi lingkungan pengendalian pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berada pada kriteria cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan dan sangat diperlukan perbaikan guna mendukung terlaksananya SPIP yang baik pada BPKAD Kota Kupang.
2. Sub unsur yang paling berpengaruh dalam membangun lingkungan pengendalian yang kondusif pada BPKAD Kota Kupang adalah sub unsur kepemimpinan yang kondusif, komitmen pada kompetensi serta pemantauan pengendalian intern.
3. Terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kota Kupang dalam penyelenggaraan SPIP seperti adanya keterbatasan biaya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi SPIP kepada semua pegawai dilingkungan BPKAD Kota Kupang; adanya keterbatasan biaya dalam pelaksanaan SPIP; sumber daya manusia; serta waktu dalam melakukan pemetaan SPIP dan kegiatan penilaian resiko; sehingga pemetaan SPIP dan penilaian resiko yang telah dilaksanakan hanya dilakukan terhadap beberapa SKPD terpilih.

6.2. Saran

1. Pada penelitian ini, penulis menyarankan agar Badan Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kupang benar-benar melaksanakan pengendalian intern yang pada penerapannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk itu, diperlukan komitmen dukungan yang tegas dari wali kota selaku pucuk pimpinan serta komitmen dan dukungan dari seluruh jajaran pejabat beserta staf pada BPKAD Kota Kupang. Hal ini juga terkait dengan lingkungan pengendalian terkait dengan penegakkan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap peningkatan kompetensi; komitmen untuk terus menciptakan kepemimpinan yang kondusif; komitmen untuk membuat kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM; dan komitmen untuk terus menerapkan APIP yang efektif. Maka, BPKAD Kota Kupang perlu terus melakukan pengembangan kegiatan lingkungan pengendalian guna menciptakan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penggunaan anggaran dan mutasi pejabat; serta menciptakan dan melaksanakan SOP terkait pemberian penghargaan dan hukuman mengenai SDM dan sarana prasarana yang di nilai masih kurang.

2. Terkait dengan integritas dan etika, BPKAD Kota Kupang perlu terus melakukan pembinaan kepada aparatur secara berjenjang oleh pimpinan, baik secara personal serta pemberian penghargaan dan sanksi yang tegas.
3. Terkait dengan komitmen terhadap kompetensi, BPKAD Kota Kupang perlu terus meningkatkan alokasi anggaran yang mengarah pada kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi serta memperbanyak jumlah kegiatan seperti bimtek, diklat, sosialisasi dan seminar.

4. Terkait dengan struktur organisasi, diharapkan untuk terus membenahi struktur organisasi yang disertai dengan pembagian tugas, tanggung jawab, fungsi dan kewenangan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan *overlap* dan tumpang tindih. Dengan demikian, memudahkan garis instruksi dan koordinasi yang berorientasi pada kinerja.
5. Terkait dengan kinerja aparatur pelaksana, diharapkan agar perlu diterbitkan SOP perihal *reward and punishment* serta perlu terus ditingkatkan pemberian *reward and punishment*, sehingga dapat memotivasi para pegawai untuk berkinerja lebih baik lagi.
6. Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang di dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.
7. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya keterbatasan penelitian di atas dilengkapi dengan memperbanyak jumlah informan sehingga informasi yang diperoleh lebih menggambarkan kondisi lingkungan pengendalian dalam penerapan SPIP di Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan. 2006. (<http://repository.stiesia.ac.id/621/4/Bab%202.pdf>) [diakses pada tanggal 2 April 2020]
- Gerald. 2006. (<http://repository.stiesia.ac.id/621/4/Bab%202.pdf>) [diakses pada tanggal 22 mei 2020]
- Handoko, Farid. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Simulasi Penyelenggaraan SPIP. 2013
- Lonto, Pingkan. 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Lingkungan Pengendalian*. Sijunjung.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi Salemba Empat*. Jakarta
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Salemba Empat*. Jakarta
- Nugroho, Widjajanto. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Erlangga: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. BPKP
- Tarigan, Timotius. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2013. *Pemantauan Penyelenggaraan SPIP*. Bogor
- Tohom, Andilo. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2013. *Penyelenggaraan SPIP Interatif*. Bogor
- Wati, Ofni. 2016. *Analisis Lingkungan Pengendalian Studi Kasus Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Kabupaten Sijunjung*. Masters Thesis, Universitas Andalas.
- <https://trihastutie.wordpress.com/2010/02/16/unsur-dan-prinsip-sistem-pengendalian-intern/>[diakses pada tanggal 2 April 2020]
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbp_tuni_kompp_gdl_tiarakeape-34976-8-unikom_t-i.pdf[diakses pada tanggal 2 April 2020]
- <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4940/Bab%202.Pdf?sequence=4>[diakses pada tanggal 2 April 2020]
- <https://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/05/27/akuntansi-pengendalian-internal/>[diakses pada tanggal 2 April 2020]